Laporan Kegiatan Policy Talks
Revisi UU TNI: Narasi Keamanan vs. Kontrol Sipil

Hari, Tanggal tayang	Rabu, 10 Desember 2025
Tempat	Zoom Meeting
Waktu	14.00 – 16.00 WIB
Pembicara	1. Felia Primaresti (Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research/TII) 2. Jaleswari Pramodhawardani (Kepala Laboratorium Indonesia 45/Lab 45) 3. Mugiyanto Sipin (Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

Ringkasan

Pada Rabu, 10 Desember 2025 telah diadakan Policy Talks secara daring dengan judul ”Revisi UU TNI: Narasi Keamanan vs. Kontrol Sipil”. Diskusi ini menghadirkan Felia Primaresti (Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research/TII), Ibu Jaleswari Pramodhawardani (Kepala Laboratorium Indonesia 45/Lab 45), dan Bapak Mugiyanto Sipin (Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Diskusi ini juga paralel dengan diseminasi kajian tahunan The Indonesian Institute, yaitu Indonesia 2025 di bidang politik.

Di awal, Felia Primaresti menjelaskan bahwa adanya narasi yang kontradiksi antara upaya revisi UU TNI dengan kebutuhan melindungi hak masyarakat sipil, terutama proses pembuatannya yang tertutup tanpa partisipasi publik secara bermakna. Felia menyampaikan bahwa kebijakan bukan hanya berfokus pada hasil, tetapi juga menganalisis aktor yang membicarakan narasi bersangkutan, jenis narasi yang dipakai, dan menganalisis siapa yang menang atau terpinggirkan. Dalam matriks temuannya, Felia menemukan bahwa mayoritas narasi TNI yang sering diucapkan dalam konteks kebijakan UU TNI adalah sebagai regulasi yang menjaga profesionalisme TNI dalam berkiprah.

Dari segi tokoh, narasi yang dibawakan pemerintah (DPR, TNI) terkait UU TNI cenderung menampilkan pemerintah sebagai *hero* melalui kehadiran UU TNI. Sementara, dari masyarakat sipil memandang bahwa UU TNI mengancam keberlangsungan demokrasi akibat militerisasi. Dari segi variabel amanat, pemerintah memandang bahwa revisi UU TNI diperlukan untuk menjawab tantangan geopolitik dan perbaikan profesionalisme UU TNI. Sementara itu, bagi masyarakat, amanat revisi UU TNI sah-sah saja, tetapi harus dipastikan secara transparan dan melibatkan masyarakat. Kesimpulannya, masih ditemukan adanya relasi kuasa di level horizontal dan vertikal yang membuat pemerintah dan masyarakat sipil mengalami perbedaan produksi narasi.

Felia mempertegas bukti-bukti maraknya militerisasi yang merambah struktur kelembagaan pemerintah. Contohnya, adanya dominasi TNI menjabat dalam Badan Gizi Nasional, pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis, rekrutmen prajurit untuk mengurus pangan, bahkan pengelolaan hutan. Baginya, militerisasi ini justru kontradiktif dengan narasi yang pemerintah keluarkan mengenai tujuan revisi UU TNI, yaitu untuk meningkatkan profesionalisme TNI. Idealnya, untuk mengatasi geopolitik dan melindungi masyarakat sipil, seharusnya hal yang difokuskan adalah meningkatkan profesionalisme TNI dalam mengelola tren geopolitik terkini. Di akhir, Felia menegaskan bahwa ruang partisipasi publik tidak boleh terpinggirkan karena revisi UU TNI bukan sekadar kebutuhan keamanan, melainkan produk kontestasi naratif dan konsolidasi kekuasaan yang harapannya dapat memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

Felia merekomendasikan agar DPR dan Komisi I perlu memastikan implementasi revisi UU TNI tetap tunduk pada prinsip demokrasi dan kontrol sipil, Kementerian Pertahanan harus membuka transparansi anggaran dan melibatkan publik dalam evaluasi program non-pertahanan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dengan lembaga sipil; BPK dan KPK harus melakukan audit menyeluruh atas kegiatan ekonomi TNI, terutama di proyek strategis yang rawan konflik kepentingan; Kementerian Komunikasi dan Digital harus meninjau ulang regulasi digital yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil terkait, seperti SAFENet hingga Asosiasi Jurnalis Indonesia; terakhir koalisi masyarakat sipil perlu membentuk gugus tugas lintas sektor untuk memonitor dampak revisi UU TNI. Oleh karena itu, dua jalur advokasi yang bisa kita jalankan, bisa melalui kebijakan (dialog dengan DPR) hingga kultural (kampanye kreatif).

Jaleswari Pramodhawardani menegaskan bahwa perluasan wewenang TNI patut masyarakat sipil selalu monitoring karena berpotensi memberikan dampak negatif untuk ke depannya. Contohnya, seperti mengikis fondasi ruang sipil, melemahkan institusi demokrasi, hingga menghambat konsolidasi demokrasi jangka panjang. Secara global Jaleswari Pramodhawardani menegaskan bahwa demokrasi sedang menghadapi kemunduran karena pelemahan supremasi sipil akibat peningkatan keterlibatan militer.

Apabila menggunakan lensa analisis Huntington dan Feaver dapat kita amati bahwa kontrol objektif yang mulanya dipegang TNI kemudian beralih menjadi kontrol subjektif yang tersimbolisasi melalui partisipasi TNI dalam politik/kabinet/bisnis dan sektor lainnya. Peran militer di Indonesia pun telah berevolusi menuju era ”multifungsi” melihat adanya keaktifan militer kembali di luar sektor pertahanan. Hal yang perlu diwaspadai era multifungsi ini justru disamarkan dengan *branding* atau narasi pemerintah yang ingin menjaga kualitas demokrasi.

Jaleswari Pramodhawardani menambahkan bahwa hampir sebagian besar publik justru lebih percaya pada TNI (86%) dibandingkan partai politik (66%). Hal ini dapat terjadi karena TNI masih sering disematkan dengan narasi ”penyelamat/*hero*”. Hal ini bisa kita lihat juga dalam konteks penanganan bencana terkini, di mana TNI/militer dianggap disiplin, efisien, dan cekatan, terutama dalam mendukung program populis sementara sipil adalah individu yang korup dan lambat. Labelisasi narasi penyelamat pada TNI ini perlu dikritisi agar narasi seperti ini tidak kembali berlanjut ke generasi sebelumnya. Ke depannya, kita perlu mendekonstruksi

persepsi label TNI yang selama ini dianggap cekatan dan sigap karena tanpa sadar publik juga membenarkan fenomena ini secara turun-temurun. Bahkan, tanpa sadar kita terbiasa saat berkomunikasi menggunakan kata ”izin”, ”siap”.

Jaleswari Pramodhawardani juga memaparkan terkait regulasi baru dan implementasi militerisasi sipil ini dapat menciptakan kekosongan kapasitas masyarakat sipil, menggeser sipil untuk melakukan kerja-kerja dalam konteks birokrasi, alat otokratisasi, seperti yang terjadi di Venezuela dan Filipina, sehingga militer menjadi kaki tangan dari pihak eksekutif. Krisis demokrasi pun patut kita waspadai dan meningkatkan risiko eskalasi konflik seperti dengan aksi pengerahan militer di zona abu-abu (masa damai) yang memicu eskalasi konflik yang tidak perlu.

Untuk itu, diperlukan penguatan institusi sipil dengan memprioritaskan kapasitas parlemen dan birokrasi agar tidak bergantung pada jalan pintas militer, seperti melalui pembagian tugas yang jelas dan peran antara peran militer di pertahanan eksternal hingga peran non tradisional. Terakhir pengawasan dan reformasi menjadi pekerjaan rumah mendasar untuk mengawasi penggunaan anggaran dan kebijakan militer, serta mendorong reformasi internal TNI yang patuh pada konstitusi.

Di akhir, Bapak Mugiyanto selaku Wakil Menteri Hak Asasi Manusia memaparkan tanggapannya mengenai revisi UU TNI No 3 Tahun 2025, Perspektif HAM, Supremasi Sipil, dan Perlindungan Hak Fundamental. Beliau menjelaskan, pemerintah saat ini berupaya agar setiap substansi kebijakan telah menginternalisasi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kementerian HAM selalu mengupayakan untuk menjaga komunikasi secara lebih lanjut dengan pihak kepolisian agar implementasinya tidak merugikan masyarakat sipil. Termasuk dengan melakukan audit kewenangan kementerian lembaga lainnya terkait penegakan HAM yang sayangnya masih jarang diketahui oleh masyarakat sipil.

Bapak Mugiyanto juga menginformasikan bahwa terbaru, Kementerian HAM juga melakukan inventarisasi isu penegakan HAM melalui Musrenbang HAM yang hari ini akan diserahkan kepada Bappenas dan K/L terkait untuk mengawal implementasi UU TNI yang sudah direvisi. Prinsip kehati-hatian juga diupayakan agar implementasinya tetap memastikan partisipasi publik yang bermakna serta transparansi dokumen yang bisa dimonitor oleh masyarakat. Kementerian HAM akan mengawal implementasi UU TNI maupun rencana revisi lanjutan agar selaras dengan prinsip HAM dan mandat konstitusional. Semoga apa yang dibahas di diskusi ini bisa dilanjutkan hingga dikolaborasikan, termasuk dengan dialog-dialog lanjutan mengingat isu HAM juga selaras untuk mewujudkan visi Asta Cita serta penguatan demokrasi.

Pada sesi tanya jawab, Felia merespons kembali dan membenarkan potensi pengikisan demokrasi akibat revisi UU TNI. Hal yang perlu dibenahi ke depannya adalah bagaimana masyarakat sipil harus selalu memastikan pemerintah bisa memberikan komunikasi publik yang baik terutama dengan melibatkan orang muda akan pentingnya penurunan kualitas demokrasi yang turut memengaruhi kualitas hidup masyarakat, terutama memengaruhi keterbukaan kesempatan kerja bagi orang muda yang terancam melalui dominasi militer dalam

ruang-ruang sipil. Jadi, membumikan risiko penurunan kualitas demokrasi harus selalu digaungkan untuk memperkuat solidaritas masyarakat sipil.

Kemudian, terkait budaya Indonesia yang masih minim mengkritisi TNI dapat dilatarbelakangi juga akibat kurangnya paparan masyarakat akan kerja-kerja dari TNI yang selama ini cenderung tertutup, sehingga fokus kritik lebih ke arah partai politik yang selama ini dinamika kerjanya lebih terlihat. Kemudian, Jaleswari Pramodhawardani menambahkan bahwa citra partai politik dapat lebih rendah dari TNI karena secara langsung masyarakat menyasarkan kemarahannya kepada instansi selain TNI yang selama ini berelasi dengan masalah yang dialami masyarakat. Contohnya, marahnya masyarakat kepada DPR yang selama ini memegang amanah aspirasi rakyat. Oleh karena itu, Jaleswari Pramodhawardani juga sepakat bahwa diperlukan membumikan terkait korelasi isu militer dengan penurunan kualitas demokrasi. Termasuk, bekerja sama dengan para jurnalis agar isu ini makin diarusutamakan di sosial media.

Ketiga narasumber sepakat bahwa tugas kita ke depannya adalah dengan menjaga stabilitas ruang publik, memperjuangkan kualitas demokrasi agar tantangan supremasi sipil ini tidak semakin keluar jalur. Bahkan, dominasi militer dapat mencoreng itikad reformasi yang sudah diupayakan oleh Indonesia. Mari selalu berkolaborasi untuk menyuarakan isu ini demi menjadi investasi kita dalam mendukung pembangunan negara. Kolaborasi ini juga wujud kita untuk mencintai generasi Indonesia di masa depan.